

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan laporan keuangan atau *fraudulent financial reporting* merupakan tindakan manipulasi, penyimpangan, atau pengaburan informasi keuangan oleh manajemen perusahaan untuk menyajikan kondisi keuangan yang tidak sesuai dengan realitanya. Fenomena ini telah menjadi perhatian global karena tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak integritas pasar modal, menurunkan kepercayaan investor, dan berdampak pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan (Suhandoko & Firmansyah, 2023).

Salah satu laporan paling komprehensif terkait kecurangan keuangan secara global dikeluarkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* setiap dua tahun. Dalam laporan *Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations*, ACFE mengidentifikasi bahwa perusahaan rata-rata kehilangan 5% dari pendapatannya setiap tahun akibat kecurangan. Dari jumlah tersebut, sekitar 10% berasal dari kecurangan dalam pelaporan keuangan (*financial statement fraud*), yang walaupun secara persentase relatif kecil dibanding jenis kecurangan lain (seperti korupsi atau penyalahgunaan aset), tetapi memiliki nilai kerugian paling besar (ACFE, 2022).

Fenomena terkini yang mencerminkan risiko serius dari kecurangan pelaporan keuangan dapat ditemukan dalam kasus Silicon Valley Bank (SVB) pada tahun 2023. Kebangkrutan SVB yang merupakan bank terbesar ke-16 di Amerika Serikat mengejutkan pasar modal karena memperlihatkan kelemahan dalam

manajemen risiko dan pengungkapan keuangan. SVB diketahui gagal mengelola risiko atas investasi obligasi jangka panjangnya di tengah kenaikan suku bunga secara agresif, yang menyebabkan kerugian tidak terealisasi secara signifikan dan tidak segera diungkapkan secara terbuka kepada pemangku kepentingan (Deloitte, 2023). Ketika para nasabah mengetahui kondisi keuangan bank, terjadi *bank run* yang memperparah situasi, dan akhirnya bank dinyatakan bangkrut. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaporan keuangan serta efektivitas fungsi pengawasan terhadap institusi keuangan.

Di tengah fenomena global tersebut, teknologi akuntansi dan audit terus berkembang dengan tujuan mendeteksi dan mencegah kecurangan. Namun, pelaku kejahatan keuangan juga semakin adaptif dan kompleks dalam menyusun strategi mereka. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap motivasi dan faktor-faktor penyebab kecurangan menjadi sangat penting. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa kecurangan laporan keuangan tidak semata-mata disebabkan oleh tekanan finansial, tetapi juga oleh faktor internal seperti lemahnya tata kelola perusahaan (*corporate governance*), kepemimpinan yang otoriter, serta budaya organisasi yang tidak etis (Pradipta & Nugroho, 2023).

Menurut *Teori Fraud Triangle* yang dikembangkan oleh Donald Cressey, terdapat tiga elemen utama yang memicu terjadinya kecurangan, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Teori ini kemudian dikembangkan menjadi *Fraud Pentagon* dengan menambahkan dua elemen, yaitu arogansi (*arrogance*) dan kompetensi (*capability*). Terakhir, muncul *Fraud Hexagon Theory* yang menambahkan satu unsur baru lagi yaitu kolusi

(*collusion*) untuk menjelaskan bagaimana kerja sama antar pihak internal dapat memperkuat terjadinya fraud (Oktaviany & Reskino, 2023).

Dalam praktiknya, kecurangan laporan keuangan sering terjadi karena lemahnya sistem pengawasan internal dan ketidakefektifan pengendalian risiko perusahaan. Di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, masalah ini diperparah oleh tingginya tingkat koneksi politik, konflik kepentingan, dan lemahnya penegakan hukum. Menurut studi oleh Sukmadilaga et al. (2022), perusahaan yang memiliki struktur tata kelola lemah, seperti minimnya independensi dewan komisaris dan komite audit, lebih rentan terhadap praktik manipulasi laporan keuangan.

Tidak hanya terjadi di sektor swasta, fenomena kecurangan laporan keuangan juga terjadi di institusi publik dan perusahaan milik negara. Laporan-laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Indonesia, misalnya, masih sering mengungkap berbagai penyimpangan dalam pelaporan keuangan instansi pemerintah maupun perbankan. Fenomena ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan kecurangan harus dilakukan secara sistematis, tidak hanya melalui audit rutin tetapi juga peningkatan kesadaran etika, transparansi, dan akuntabilitas (Fransisca & Suhartono, 2025).

Di Indonesia, sektor perbankan memegang peranan vital dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Bank tidak hanya menjadi perantara keuangan, tetapi juga berkontribusi dalam pengelolaan moneter, penyaluran kredit, serta penghimpunan dana masyarakat. Namun demikian, industri perbankan juga kerap menjadi sorotan dalam isu akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan. Sejumlah kasus manipulasi laporan keuangan di bank-bank nasional

menunjukkan bahwa sektor ini tidak kebal terhadap praktik kecurangan yang dapat merugikan nasabah, investor, dan system keuangan secara keseluruhan (Putri & Utami, 2022).

Perbankan memiliki karakter khusus, seperti pengawasan ketat oleh otoritas regulator (OJK dan BI), kompleksitas produk keuangan, dan tingginya ekspektasi terhadap kepercayaan publik. Kombinasi antara kepatuhan regulasi dan tuntutan kinerja finansial seringkali menciptakan tekanan tinggi terhadap manajemen bank. Dalam konteks tersebut, potensi *moral hazard* meningkat karena terdapat insentif bagi pihak internal untuk menyembunyikan kerugian atau memoles laporan keuangan demi menjaga reputasi dan harga saham (Sentosa et al., 2023).

Salah satu kasus terkini yang mencuat adalah skandal yang menimpa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten), yang mengalami kesulitan keuangan akibat dugaan praktik pengelolaan dana yang tidak prudent. Laporan investigatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya ketidaksesuaian dalam pencatatan aset, pemberian kredit bermasalah tanpa analisis kelayakan, serta rekayasa laporan laba rugi yang menyebabkan misinformasi terhadap pemegang saham dan publik. Akibatnya, pemerintah daerah harus melakukan intervensi modal besar-besaran untuk menyelamatkan bank dari kebangkrutan (BPK RI, 2023).

Lebih lanjut, keterkaitan antara sektor perbankan dengan kepentingan politik dan ekonomi turut memperbesar risiko kecurangan. Beberapa bank daerah dan pembangunan milik pemerintah daerah diketahui memiliki pengurus yang berasal dari kalangan politisi atau memiliki afiliasi dengan kekuasaan lokal. Hal ini memperlemah independensi manajerial dan meningkatkan risiko kolusi dalam

pengambilan keputusan strategis, termasuk pemberian kredit kepada pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan (Yuliana & Hadi, 2021).

Dari sisi regulasi, otoritas keuangan Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan tata kelola perbankan. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, peningkatan pengawasan melalui system pelaporan digital seperti SLIK (Sitem Layanan Informasi Keuangan), serta evaluasi berkala oleh OJK menjadi bagian dari upaya tersebut. Namun, efektivitas regulasi ini masih menghadapi tantangan terutama terkait budaya organisasi di beberapa institusi yang masih permisif terhadap pelanggaran etika dan lemahnya sistem pengendalian internal (Wijayanti & Firmansyah, 2022).

Dalam konteks ini, *Teori Fraud Hexagon* menjadi pendekatan yang relevan untuk memahami akar penyebab kecurangan pelaporan keuangan di sektor perbankan. Teori ini mengembangkan kerangka *Fraud Triangle* dan *Fraud Pentagon* dengan menambahkan unsur *collusion* atau kolusi sebagai faktor penting. Unsur ini mencerminkan bahwa kecurangan di perusahaan sering kali tidak dilakukan secara individual, melainkan melalui kerja sama antara pihak internal seperti manajemen, auditor internal, bahkan dengan pihak regulator lokal, terutama pada bank-bank dengan tata kelola yang lemah (Sukmadilaga et al., 2022).

Selain itu tekanan (*pressure*) juga menjadi faktor signifikan. Dalam industri perbankan, tekanan bisa muncul dari target kinerja tahunan, kebutuhan menjaga likuiditas, keharusan menjaga peringkat kredit bank, dan ekpektasi investor. Studi oleh Hartono dan Mukhibad (2024) menunjukkan bahwa tekanan finansial dan reputasional secara signifikan mendorong tindakan manipulatif dalam pelaporan keuangan bank, terutama pada bank-bank yang sedang mengalami kesulitan modal.

Penelitian mengenai deteksi kecurangan laporan keuangan telah berkembang dari waktu ke waktu. Awalnya, banyak studi berfokus pada *Fraud Triangle Theory* yang dikemukakan oleh Cressey (1953), yang meliputi tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) sebagai penyebab utama terjadinya fraud. Namun, teori ini dianggap kurang komprehensif karena tidak memasukkan elemen lain seperti kompetensi (*capability*) dan arogansi (*arrogance*) dalam organisasi. Seiring waktu, berbagai pengembangan dilakukan, termasuk *Fraud Pentagon Theory* dan terbaru adalah *Fraud Hexagon Theory* yang menambahkan satu elemen penting yaitu kolusi (*collusion*) (Sukmadilaga et al., 2022).

Kesenjangan teori utama yang teridentifikasi adalah belum banyak penelitian yang secara khusus menguji *Fraud Hexagon Theory* secara empiris dalam konteks perbankan, khususnya di Indonesia. Sebagian besar studi masih berfokus pada *Fraud Triangle* atau *Pentagon*, padahal konteks perbankan memiliki kompleksitas yang unik, seperti dominasi politik, kepentingan pemangku kepentingan yang beragam, dan tekanan dari pemerintah (Murdoko & Harjito, 2023). Keterbatasan inilah yang menunjukkan bahwa perlu adanya kajian lanjutan menggunakan teori yang lebih komprehensif seperti *Fraud Hexagon Theory*.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor individu, organisasi, dan struktural memiliki peran penting dalam mendorong atau mencegah terjadinya kecurangan laporan keuangan, khususnya pada sektor publik seperti perbankan. Anggraini dan Kristianto (2021) menemukan bahwa arogansi eksekutif secara signifikan mendorong kecurangan karena sikap kebal terhadap aturan. Aryani dan Wijaya (2022) menegaskan bahwa kompetensi dan etika profesional yang tinggi

mampu mengurangi risiko kecurangan. Haryanto dan Utami (2023) menyatakan bahwa tekanan internal dan eksternal mendorong eksekutif untuk memanipulasi laporan demi memenuhi ekspektasi.

Sementara itu, Kusuma dan Setyawan (2022), serta Yuniarti dan Aziz (2023), menunjukkan bahwa kolusi antara manajemen dan auditor memfasilitasi manipulasi laporan keuangan, terutama dalam perusahaan besar dengan pengawasan yang lemah. Nabila dan Hidayat (2021) menunjukkan bahwa lemahnya kontrol internal dan pengawasan meningkatkan peluang terjadinya kecurangan. Rini dan Sari (2022) juga menyoroti bahwa rasionalisasi menjadi faktor penting dalam melegitimasi tindakan manipulatif. Terakhir, Hartono dan Mukhibad (2024) membuktikan bahwa seluruh elemen dalam *Fraud Hexagon* secara signifikan memengaruhi potensi kecurangan laporan keuangan di sektor publik, menegaskan urgensi penerapan pengawasan dan tata kelola yang lebih ketat.

Seiring dengan berkembangnya teori dan pendekatan dalam memahami perilaku *fraud*, *Fraud Hexagon Theory* hadir sebagai pengembangan dari teori sebelumnya, yang berusaha memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memicu terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Kecurangan laporan keuangan merupakan salah satu bentuk *fraud* yang paling merugikan, baik bagi investor, regulator, maupun pemangku kepentingan lainnya. Dalam Upaya memahami faktor-faktor yang mendorong terjadinya *fraud*, berbagai teori telah digunakan, salah satunya adalah *Fraud Hexagon Theory* yang mengidentifikasi enam elemen penyebab *fraud* yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, kemampuan, arogansi, dan kolusi. Teori ini memberikan pendekatan

yang lebih komprehensif dibandingkan pendahulunya seperti *Fraud Triangle* dan *Fraud Pentagon*.

Namun, Sebagian besar penelitian terdahulu yang menggunakan *Fraud Hexagon Theory* masih memiliki keterbatasan, terutama dalam cakupan waktu penelitian yang relative singkat dan kurang mempertimbangkan dinamika kondisi ekonomi serta perubahan regulasi yang terjadi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan kontekstual agar dapat memberikan pemahaman yang lebih akurat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali faktor-faktor yang memengaruhi kecurangan laporan keuangan berdasarkan perspektif *Fraud Hexagon Theory*. Penelitian ini difokuskan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2021-2024. Pemilihan perusahaan perbankan didasarkan pada karakteristiknya yang strategis bagi perekonomian nasional, serta kompleksitas tata kelolanya yang menjadikannya rentan terhadap praktik *fraud*.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, studi ini tidak hanya mereplikasi model yang telah ada, tetapi juga memberikan kontribusi baru dengan menggunakan periode observasi yang lebih panjang. Selain itu, penggunaan data pada periode 2021-2024 mencerminkan dinamika lingkungan ekonomi dan perubahan regulasi yang signifikan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih aktual dan relevan mengenai fenomena kecurangan laporan keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia. Berdasarkan variabel penelitian dan perluasan tahun observasi, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian ini dengan

judul “Penggunaan Fraud Hexagon Theory dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan (Studi pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2024)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tekanan (*pressure*) memberikan pengaruh dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan?
2. Apakah peluang (*Opportunity*) memberikan pengaruh dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan?
3. Apakah rasionalisasi (*rationalization*) memberikan pengaruh dalam mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan?
4. Apakah kompetensi (*capability*) memberikan pengaruh dalam mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan?
5. Apakah arogansi (*arrogance*) memberikan pengaruh dalam mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan?
6. Apakah kolusi (*collusion*) memberikan pengaruh dalam mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menguji fenomena tentang pengaruh komponen tekanan (*pressure*) dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan secara empiris.
2. Menguji fenomena tentang pengaruh komponen peluang (*opportunity*) dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan secara empiris.

3. Menguji fenomena tentang pengaruh komponen rasionalisasi (*rationalization*) dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan secara empiris.
4. Menguji fenomena tentang pengaruh komponen arogansi (*arrogance*) dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan secara empiris.
5. Menguji fenomena tentang pengaruh komponen kompetensi (*capability*) dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan secara empiris.
6. Menguji fenomena tentang pengaruh komponen kolusi (*collusion*) dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan secara empiris.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh *Fraud Hexagon Theory* terhadap kecurangan laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi manajemen perbankan dan auditor internal dalam mengidentifikasi dan mencegah terjadinya fraud pada laporan keuangan. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi efektivitas tata kelola perusahaan dan penguatan sistem pengawasan internal.

3. Manfaat Kebijakan

Bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dalam mencegah *fraud* dalam laporan keuangan sektor perbankan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran mengenai penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisan pada skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, antara lain :

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II membahas teori-teori yang mendasari penelitian, yaitu *Fraud Hexagon Theory* sebagai kerangka utama untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan, serta *Agency Theory* sebagai teori pendukung. Bab ini juga menguraikan variabel penelitian, yaitu enam elemen dalam *Fraud Hexagon* (*pressure, opportunity, rasionalization, capability, arrogance, dan collusion*). Selain itu, dipaparkan hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antar variabel, dan hipotesis penelitian yang dirumuskan berdasarkan teori dan kajian empiris.

Bab III merupakan metode penelitian. Bab ini menjelaskan desain penelitian yang mencakup semua struktur penelitian yang diawali sejak ditemukannya ide sampai diperoleh hasil penelitian. Populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan. Bab ini menjelaskan pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dengan analisis yang digunakan serta menjawab pertanyaan dari paparan rumusan masalah. Bab ini mencakup data analisis, hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V merupakan penutup. Bab ini berisi uraian kesimpulan dan jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian ini dimana selanjutnya akan digunakan untuk penelitian dimasa yang akan datang.